

**TESIS**

**STRATEGI PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA  
MANDIRI DI KABUPATEN TANA TORAJA**

*Village Development Strategy towards Independent Villages in  
Tanah Toraja Regency*

**MARWANTHO  
A042191008**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITA HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**STRATEGI PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA  
MANDIRI DI KABUPATEN TANA TORAJA**

*Village Development Strategy towards Independent Villages in  
Tanah Toraja Regency*

**MARWANTHO  
A042191008**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITA HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**  
**STRATEGI PENGEMBANGAN DESA (MENUJU DESA MANDIRI**  
**DI KABUPATEN TANA TORAJA)**

disusun dan diajukan oleh

**MARWANTHO**  
**A042191008**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

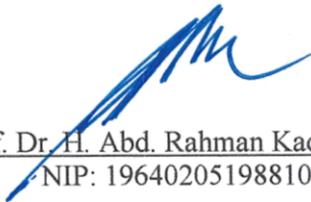
Pada tanggal 27 Juli 2021

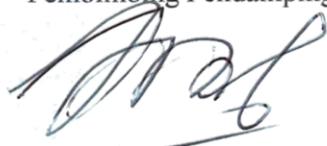
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

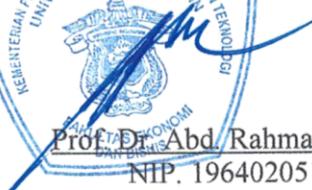
  
Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si  
NIP: 196402051988101001

  
Prof. Dr. Maat Pono, S.E.,M.Si  
NIP. 195807221986011001

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,

  
Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si  
NIP. 197106192000031001

  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si  
NIP. 196402051988101001

**TESIS**  
**STRATEGI PENGEMBANGAN DESA (MENUJU DESA MANDIRI**  
**DI KABUPATEN TANA TORAJA)**

disusun dan diajukan oleh :

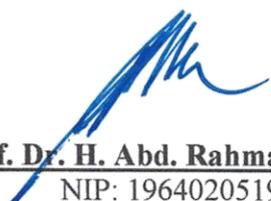
MARWANTHO  
A042191008

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 27 Juli 2021

Komisi Penasehat

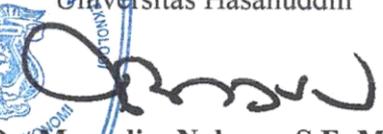
Ketua

  
**Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si**  
NIP: 196402051988101001

Anggota

  
**Prof. Dr. Maat Pono, S.E., M.Si**  
NIP: 195807221986011001

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si**  
NIP: 197106192000031001



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARWANTHO

NIM : A042191008

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

### **STRATEGI PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA MANDIRI DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



MARWANTHO

## **PRAKATA**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si dan Prof. Dr. Maat Pono, S.E.,M.Si Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Bupati Tana Toraja yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.,CRA.,CRP.,CWM Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.
6. Bapak. Prof. Dr. Nurdin Brasit, SE., M.Si, Ibu Dr. Darmawati, SE., M.Si.,

Ak., CA, dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si, sebagai Tim penilai yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.

7. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis

**MARWANTHO**

## ABSTRAK

**MARWANTHO.** *Strategi Pengembangan Desa Menuju Desa Mandiri di Kabupaten Tana Toraja* (dibimbing oleh Abd. Rahman Kadir dan Maat Pono).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) strategi pemetaan potensi desa terhadap pengembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja; (2) strategi peningkatan kualitas SDM terhadap pengembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja; dan (3) strategi penggunaan sistem teknologi informasi terhadap pengembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan desa di Kabupaten Tana Toraja adalah: (1) melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata; (2) meningkatkan sumber daya manusia (SDM), yaitu dengan melakukan pembinaan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa, dan penataan administrasi pemerintah desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; dan (3) memperluas pemasaran dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan teknologi berbasis internet.

Kata kunci: pengembangan desa, Desa Merdeka, pemerintah daerah



## ABSTRACT

**MARWANTHO.** *Village Development Strategy towards Independent Village in Tanah Toraja Regency* (Supervised by **Abd. Rahman Kadir** and **Maat Pono**)

This research aims: 1) to describe how the strategy of village potential mapping towards village development done by regional government in Tanah Toraja Regency; 2) to describe how the improvement of human resources quality towards village development done by the regional government in Tanah Toraja Regency, and 3) to describe the strategies of information technology system utilization strategies towards village development done by the regional government in Tanah Toraja Regency.

The research method used was descriptive analysis method, as well as SWOT analysis.

Based on the results, the following strategy that can be used for the village development strategy are as follows: 1) Mapping of village potential and market network that could be managed to become the village economic source and society's economy through tourism sector; 2) Increasing the quality of Human Resources by doing direct guidance to execute development acceleration in socio-cultural aspect, and 3) broadening marketing by making use of the information technology development, by using the internet-based technology.

Keywords: Village Development, Independent Village, Regional Government



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang Masalah.....	1
1.1. Rumusan Masalah .....	10
1.2. Tujuan Penelitian .....	10
1.3. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II :LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1. Landasan Teori .....	13
2.1.1. Teori Pembangunan Desa .....	13
2.1.2. Landasan Teoritis Strategi .....	21
2.1.3. Landasan Teoritis Pengembangan .....	23
2.1.4. Landasan Teoritis Desa Mandiri.....	25
2.2. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>35</b>
3.1. Kerangka Konseptual .....	35

3.2. Strategi Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri.....	36
<b>BAB IV : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
4.1..Lokasi Penelitian.....	38
4.2..Kehadiran Peneliti.....	38
4.3..Data dan Sumber Data .....	39
4.4..Teknik Pengumpulan Data.....	39
4.5..Teknik Analisis Data .....	41
4.6..Pengecekan Keabsahan Temuan.....	46
4.7..Tahap-tahap Penelitian .....	47
<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
5.1. Deskripsi Data .....	50
5.1.1.Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	50
5.1.2.Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	51
5.1.3.Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	51
5.1.4.Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	52
5.2. Hasil Penelitian .....	53
5.2.1.Deskripsi Hasil Kuesioner .....	51
5.2.1.1 Faktor Internal.....	53
5.2.1.2 Faktor Eksternal.....	54
5.2.2.Perhitungan Bobot .....	54
5.2.2.1 Perhitungan Bobot Faktor Internal .....	54
5.2.2.2 Perhitungan Bobot Faktor Eksternal.....	56
5.2.3.Perhitungan Bobot dan Rating Matriks .....	55
5.2.3.1 Matriks <i>Internal Strategic Factors Analysis Summary</i> .....	54
5.2.3.2 Matriks <i>Eksternal Strategic Factors Analysis Summary</i> .....	58

5.2.4. Matriks Internal – Eksternal (IE) .....	60
5.2.5. Analisis SWOT .....	60
5.2.6. Perumusan Strategi Melalui Analisis SWOT .....	62
5.2.6.1 Strategi Pemetaan Potensi Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa .....	66
5.2.6.2 Strategi Peningkatan Kualitas SDM untuk Meningkatkan Pendapatan Desa .....	68
5.2.6.3 Strategi Penggunaan system Teknologi untuk Meningkatkan Pendapatan Desa .....	70
<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	72
6.1. Kesimpulan.....	72
6.2. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
TABEL 1.1 Indeks Desa Membangun .....	2
TABEL 1.2 Tingkat Kemiskinan Kab. Tana Toraja .....	4
TABEL 4.1 Matrik SWOT.....	44
TABEL 5.1 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	50
TABEL 5.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	50
TABEL 5.3 Responden Berdasarkan Umur.....	50
TABEL 5.4 Responden Berdasarkan Pendidikan .....	52
TABEL 5.5 Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	52
TABEL 5.6 Faktor Internal .....	53
TABEL 5.7 Faktor Eksternal .....	54
TABEL 5.8 Perhitungan Bobot Faktor Internal.....	55
TABEL 5.9 Perhitungan Bobot Faktor Eksternal .....	56
TABEL 5.10 Matriks Kekuatan ( <i>Strength</i> ) .....	57
TABEL 5.11 Matriks Kelemahan ( <i>Weakness</i> ) .....	57
TABEL 5.12 Matriks Peluang ( <i>Opportunity</i> ).....	58
TABEL 5.13 Matriks Ancaman ( <i>Threat</i> ) .....	59
TABEL 5.14 Analisis SWOT .....	60
TABEL 5.15 Prioritas Analisis SWOT .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
GAMBAR 3.1 Kerangka Konseptual .....	36
GAMBAR 4.1 Analisis SWOT .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya mempercepat pembangunan dari pinggiran, pemerintah Indonesia melaksanakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa dengan pengalokasian dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 jumlah dana desa sebesar Rp 20,8 triliun, di tahun 2016 Rp 46,8 triliun, di tahun 2017 Rp 60 triliun, di tahun 2018 Rp 111 triliun, dan di tahun 2019 mencapai angka Rp 113 triliun. Dengan jumlah dana yang prestis itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencanangkan terwujudnya 2.000 desa mandiri pada akhir tahun 2019.

Untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan pedesaan ini, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang tertuang dalam Buku RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019. Dari RJP MN ini capaian dari target strategis adalah mengurangi jumlah desa tertinggal hingga 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa di tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan desa dan status perkembangannya. Indeks desa membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai

instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019.

Dalam upaya mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri maka problem yang penting untuk diselesaikan ialah masalah kemiskinan. Di mana kemiskinan selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena pemerintah sadar akan pentingnya mengatasi persoalan kemiskinan. Jika gagal mengatasi persoalan ini maka dapat menimbulkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di tengah masyarakat, upaya serius pemerintah terbukti pada tahun 1976- 1996, kemiskinan di Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11%. (Menurut Mubyarto yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto,2007)

**Tabel 1.1 Indeks Desa Membangun**

Kec.	Nama Lembang	Indeks Desa Membangun			
		2015	2016	2017	2019
Malimbong Balepe	Lepan	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	Kole Sawangan	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
	Kole Barubatu	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
	Lemo menduruk	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	Balepe	Tertinggal	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal
Rano	Rano	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	Rano Utara	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	Rumandang	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	Rano Tengah	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	Rano Timur	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
Kurra	Bambalu	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal

Kec.	Nama Lembang	Indeks Desa Membangun			
		2015	2016	2017	2019
	Maroson	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	Lipungan Tanete	Berkembang	Berkembang	Tertinggal	Tertinggal
	Rante Limbong	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	Limbong Sampolo	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
	<b>MANDIRI</b>	-	-	-	-
	<b>MAJU</b>	-	-	-	-
	<b>BERKEMBANG</b>	1	1	-	2
	<b>TERTINGGAL</b>	12	12	13	12
	<b>SANGAT TERTINGGAL</b>	2	2	2	1

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab.Tana Toraja*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tana Toraja masih banyak desa yang tertinggal, pada tahun 2015-2019 terlihat bahwa desa tertinggal yaitu 2015 (12), 2016 (12), 2017 (13), dan 2019 (12), hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Tana Toraja masih belum terdapat desa mandiri. Hal ini biasa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti masyarakat miskin. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki kelemahan dalam berusaha karena terbatasnya sarana dan prasarana. Terlebih lagi akses dalam bidang ekonomi sehingga masyarakat miskin semakin tertinggal jauh dengan masyarakat yang memiliki akses dan potensi yang lebih tinggi. Kemiskinan merupakan salah satu indikator pembangunan yang sangat penting. Seberapa maju dan berhasil pembangunan akan tampak dari perubahan-perubahan yang signifikan pada besarnya kemiskinan itu sendiri. Itulah sebabnya pemerintah memiliki kepentingan yang sangat fundamental dalam mengatasi kemiskinan. (Janianton Damanik,2006).

**Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)</b>
<b>2014</b>	29.090
<b>2015</b>	28.590
<b>2016</b>	28.420
<b>2017</b>	29.176
<b>2018</b>	29.650

*Sumber :BPS Tana Toraja.*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebanyak 29.090 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 28.590 jiwa, namun pada 3 tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016 sampai 2018 yaitu 28.420, 29.176, 29.650 jiwa, hal ini membuktikan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah besar yang terjadi Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah memiliki tanggungjawab yang besar dalam memberantas kemiskinan. Usaha pemerintah ini terwujud dalam bentuk program- program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Program pembangunan ini dibuat guna meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semenjak sidang MPR bulan Maret 1978, Indonesia mulai mengenal dan memasuki strategi baru melalui pembangunan nasional yang dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan. Strategi terbaru ini bercirikan pemerataan pendapatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan kestabilan nasional yang dinamis. Hakekat tujuan pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan berbagai program pembangunan yang menyentuh semua

masyarakat dan wilayah. Hasil-hasil pembangunan juga diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kita melihat seberapa meningkat kesejahteraan dan pembangunan di suatu daerah perlu adanya tolok ukur. Peningkatan ini dapat ditandai dengan adanya perubahan struktur di beberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik maupun budaya. Di Indonesia khususnya di desa untuk melihat seberapa maju dan berkembangnya suatu desa dapat dilihat dari statusnya. Status desa ini dapat diketahui melalui kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar indeks desa membangun, klasifikasi status desa tersebut meliputi desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Desa mandiri merupakan status desa tertinggi diantara empat status lainnya, dimana desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah. Pada umumnya, desa yang ada di Tana Toraja belum terdapat desa yang mencapai kategori dalam desa mandiri.

Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan sehingga sangat potensial untuk kegiatan sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Tana Toraja telah dipromosikan secara proaktif sebagai sebuah tujuan wisata yang mungkin paling membuat penasaran, yang dianggap lebih terpencil, alternatif wisata yang masih lestari. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan pada peningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan

mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi negara.

Potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Tana Toraja adalah sektor pariwisata dan BUMDes. Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternative pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata. Konsep desa wisata menurut Nuryanti (dalam Edwin, 2015:154) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Hardijono dkk (2014) menyatakan bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013). Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan pokok utama dalam pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Tana Toraja. Sudah jelas terlihat dari penelitian ini bahwa banyak kendala berhubungan erat dengan masalah pokok tersebut diatas. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk menanggulangi masalah ini. Dalam jangka pendek, beberapa kegiatan misalnya: identifikasi proyek, dan studi prakelayakan harus dilakukan oleh ahli yang diambil dari luar (pemerintahan). Mitra pembangunan dapat memegang peranan penting dalam pembentukan kapasitas (*capacity building*) dengan cara mengembangkan serta membiayai program transfer pengetahuan dan keahlian.

Permasalahan lain yang dapat ditemui di Kabupaten Tana Toraja penggunaan system teknologi yang masih kurang. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa. Pemerintah Desa yang ada di Tana Toraja dalam menjalankan pemerintahan telah menggunakan sistem teknologi informasi berbasis internet. Segala macam administrasi desa, kependudukan, keuangan dan pelayanan masyarakat menggunakan sistem komputerisasi.

Pembangunan perdesaan adalah suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat miskin di desa, memperoleh apa yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun anak-anaknya. Strategi ini merupakan upaya untuk menolong golongan di antara mereka yang mencari kehidupan di daerah perdesaan untuk menguasai lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan. Rahardjo Adisasmita (2010) mengemukakan bahwa dalam pembangunan suatu wilayah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

“Pertama pemanfaatan sumber daya alam dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien dan efektif. Kedua, pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah. Ketiga, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagai insan pembangunan. Keempat, penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.”

Dalam menentukan strategi pembangunan suatu daerah, perlu penyesuaian dengan program-program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, strategi yang digunakan oleh satu daerah dengan daerah lainnya berbeda karena menyesuaikan program dan potensi yang ada. “Dalam memilih strategi pembangunan daerah harus memperhatikan tiga aspek berikut yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan strategi penyusunan target strategi.” (Blakely dikutip oleh Mudrajat Kuncoro,2015).

Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan demi terwujudnya daerah yang mandiri. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan desa mandiri sebagai manifestasi UU No. 6/2014 tentang Desa, yaitu pertama, melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. Kedua, menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa. Ketiga, membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis teknologi.

Jikalau sebuah strategi dalam pembangunan ini berhasil dilaksanakan, maka akan berdampak pada pertumbuhan pembangunan berbagai sektor di dalamnya. Untuk melihat seberapa besar keberhasilan sebuah pembangunan maka perlu adanya tolok ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menguraikan mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mewujudkan desa mandiri. Sebuah desa, dapat dikatakan desa mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya, yakni indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Setiap indeks ini memiliki dimensi dan indikatornya masing-masing.

Berdasarkan fenomena yang ada pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana pengembangan desa (menuju desa Mandiri) yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Kirowati (2018) yang meneliti mengenai pengembangan desa mandiri melalui bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian dan penelitian ini lebih fokus pada pengembangan desa untuk mewujudkan desa mandiri, karena itu, peneliti mengambil judul **“Strategi Pengembangan Desa (Menuju desa Mandiri) di Kabupaten Tana Toraja”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam penelitian maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang jelas dan tegas, sesuai dengan kriteria dan cara perumusan masalah yang benar.

Dari uraian latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemetaan potensi desa terhadap pengembangan desa mandiri yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja untuk meningkatkan pendapatan desa ?
2. Bagaimana strategi peningkatan SDM terhadap pengembangan desa mandiri yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja untuk meningkatkan pendapatan desa?
3. Bagaimana strategi penggunaan system teknologi informasi terhadap pengembangan desa mandiri yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja untuk meningkatkan pendapatan desa ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian serta latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana strategi pemetaan potensi desa terhadap pengembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana peningkatan kualitas SDM terhadap

pengembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja.

3. Untuk mendeskripsikan Bagaimana strategi penggunaan system teknologi informasi terhadap pengembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Tana Toraja.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis adalah memberikan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta berkontribusi untuk kemajuan Ekonomi Keuangan daerah khususnya kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi literature dan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat pengambilan keputusan.

2. Secara Praktis

Manfaat Penelitian secara praktis adalah manfaat penelitian yang dapat diterapkan secara langsung.

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau sebagai bahan masukan untuk kedepannya serta sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan

di UNHAS dan menyumbangkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi pembaca.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengambilan kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa yang ada dikabupaten Tana Toraja dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat dijadikan bahan materi referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait judul yang diambil dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pembangunan Desa**

Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan progresif yang berkelanjutan untuk mempertahankan kepentingan individu maupun komunitas melalui pengembangan, intensifikasi, dan penyesuaian terhadap pemanfaatan sumber daya. Pembangunan merupakan proses yang kontinu, dan juga harus dipisahkan dari konsep pertumbuhan, dimana pembangunan merupakan konsep yang lebih luas yang secara simultan melibatkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup.

Untuk lebih mempercepat pembangunan wilayah pedesaan, di samping melakukan upaya meningkatkan akselerasi pembangunan dari kondisi yang ada (*existing condition*), perlu dirumuskan konsep transformasi pembangunan pedesaan dengan konsep *cut off development*. Transformasi ini akan mengubah pertanian dan pedesaan yang “bersifat tradisional” menjadi pertanian dan pedesaan yang “berbudaya industri”. Berbudaya industri antara lain dicirikan oleh (1) produk yang berstandar dan berkualitas, (2) tepat waktu dalam pasokan produk, (3) sedikit ketergantungan terhadap lingkungan dalam proses produksi, (4) sistem permodalan yang kuat, dan (5) sistem manajemen yang akuntabel. Pembangunan wilayah pedesaan secara menyeluruh baik di bidang infrastrukturekonomi, lingkungan, transportasi, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya sangat

diperlukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di pedesaan serta mengurangi potensi urbanisasi penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan. Pembangunan wilayah di pedesaan sajatinya dilakukan tidak hanya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pedesaan secara ekonomi saja, akan tetapi juga harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sarana sosial dan sarana lingkungan yang memadai.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini

yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”.

Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa. Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama. Menurut Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010:17-19) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta

mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar bias menjadi daya dukung dalam proses pembangunan. Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan.

Namun sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.

Manusia yang berkualitas adalah SDM yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan

dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk tercapai.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan pokok utama dalam pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Indonesia. Sudah jelas terlihat dari penelitian ini bahwa banyak kendala berhubungan erat dengan masalah pokok tersebut diatas. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk menanggulangi masalah ini. Dalam jangka pendek, beberapa kegiatan misalnya: identifikasi proyek, dan studi prakelayakan harus dilakukan oleh ahli yang diambil dari luar (pemerintahan). Mitra pembangunan dapat memegang peranan penting dalam pembentukan kapasitas (*capacity building*) dengan cara mengembangkan serta membiayai program transfer pengetahuan dan keahlian.

Mereka harus memusatkan perhatian pada keahlian-keahlian yang berorientasi pada proses dan pengetahuan (*software*), dan mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendalakendala utama di dalam investasi infrastruktur. Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu yang memiliki wawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.

Sumber daya manusia harus dikelola agar memiliki keterampilan dan

kemampuan yang dibutuhkan dimasa yang akan mendatang, yang memungkinkannya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup material yang layak secara manusiawi. Dengan memiliki keterampilan atau kemampuan tersebut, manusia akan terhindar dari kehidupan yang bersifat konsumtif, karena merupakan sumber daya manusia yang produktif. Kurangnya keterampilan dan kemampuan operasional yang terbatas pada pemerintah daerah telah menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek. Khususnya, keterbatasan kapasitas terlihat lebih nyata di bidang perancangan proyek dan pengembangan, yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan.

## 2. Masalah Teknis

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Efektif dalam pemetaan potensi desa merupakan sesuatu hal yang dapat

mencapai hasil akhir sesuai dengan waktu yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya. Dalam hal keefektifan pelaksanaan pembangunan disini artinya dalam waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

### 3. Tata Kelola Pemerintahan

Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas peran aparat-aparat pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. Hingga saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. . Hal ini dapat kita lihat dari:

Partisipasi Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan dan memberikan sumbangan-sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan serta pada saat pelaksanaan itu sendiri. Dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga perkembangan yang mereka harapkan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong royong dan juga dapat kita lihat pada kegiatan rapat bulanan.

Transparansi dalam lembaga pemerintahan; Transparansi yaitu terbuka, keterbukaan. Maksudnya adalah segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, kegiatan desa, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi berarti pemerintah desa pro-aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa beserta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Transparansi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat.

Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi pelaksanaan dan program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan tersebut harus dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa tersebut.

Dengan pemerintahan desa yang transparan, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga terhadap perangkat desa. Warga desa perlu mengetahui bagaimana kinerja perangkat desa dengan kata lain transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan desa yang lebih maju. Struktur organisasi pun harus dibuat dengan benar sehingga semua perangkat desa menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

Konsistensi dalam aturan Konsisten yaitu tetap, tidak berubah-ubah.

Maksudnya dalam menetapkan suatu gagasan atau keputusan tidak berubah-ubah. Dengan memiliki sifat yang konsisten diyakini bahwa segala pekerjaan yang sedang dilakukan akan membuahkan hasil yang maksimal. Konsistensi dalam aturan ini dapat dilihat dari penerapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak berubah dari rencana atau perencanaan awal yang telah disepakati pada saat musyawarah desa bersama perangkat desa, Dusun, RT RW, Pemuka masyarakat dan BPD.

### **2.1.2 Landasan Teoritis Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan suatu pertempuran dengan sumberdaya yang terbatas. Menurut StephanieK. Marrus yang dikutip dalam buku Manajemen Strategis menyatakan:

*strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.*

*strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. ( Hamel dan Prahalad,1995).*

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya strategi merupakan suatu proses sistem yang terencana untuk

mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Pada saat suatu strategi sudah diterapkan maka akan dapat diketahui apakah strategi tersebut berhasil atau gagal pada suatu organisasi tersebut.

Adapun Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu: Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain; Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya; Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru; Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang; Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan dan Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Strategi merupakan prosedur manajerial untuk mengembangkan serta mempertahankan konsistensi yang layak antara keahlian, sumberdaya, sasaran serta peluang pasar yang berubah. Tujuan perencanaan strategi yaitu upaya untuk membentuk dan menyempurnakan produk perusahaan sehingga memenuhi target yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan suatu organisasi. Perencanaan suatu organisasi harus melalui prosedur yang sistematis terkoordinasi serta berkesinambungan. Perencanaan strategik (*strategic planning*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi; penentuan strategi, kebijakan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan penetapan

metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah diimplementasikan. Secara lebih ringkas perencanaan strategik merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategik. Pertama, perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategik sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi.

### **2.1.3 Landasan Teoritis Pengembangan**

Flippo mendefinisikan pengembangan merupakan suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan (peningkatan kemampuan), dan peningkatan ketrampilan (melalui pelatihan). Sedangkan pengembangan menurut Malayu SP Hasibuan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas teknis, teoritis, konseptual, dan modal karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan latihan. Sedangkan latihan adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang

karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang ataupun yang akan datang dan juga dapat memberikan pengarahan serta pedoman dalam mengembangkan suatu usaha.

Dalam melakukan kegiatan pengembangan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, diantaranya:

Awal usaha seseorang berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seseorang bisa berasal dari mana saja. Ide usaha muncul setelah melihat keberhasilan orang lain dengan pengamatan. Selain itu ide usaha juga dapat timbul karena adanya *sense of business* yang kuat dari seorang wirausaha.

Pada tahap selanjutnya, menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan adalah perhitungan proyeksi laba-rugi (*performa income statement*) dari bisnis yang akan dijalankan. *Performa income statement* merupakan *income statement* yang disusun berdasarkan perkiraan asumsi usaha yang akan datang dan disusun berdasarkan data-data historis.

Rencana usaha yang telah dibuat, baik secara rinci maupun secara global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha

yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seseorang akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya.

#### **2.1.4 Landasan Teoritis Desa Mandiri**

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Desa mandiri adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. (Jurnal Agungunanto, vol. 13 No. 1 Maret 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Didalam Permendes PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015) dalam Bab III Pasal 7 dan Pasal 9 juga dijelaskan bahwasanya desa maju dan/atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi

melalui pengembangan BUMDesa. Kemudian juga dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapasitas desa secara berkelanjutan.

Adapun tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri yaitu pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri (Menteri PPN/Bappenas dan BPS, Indeks Pembangunan Desa 2014: 3) yaitu: Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja; Peningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa; Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan; Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

Mengembangkan desa menjadi desa mandiri memang tidaklah mudah, ada beberapa perangkat utama yang perlu dikembangkan dalam mendukung keberhasilan proses tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya partisipasi aktif dari warga/masyarakat yang menjadi modal sosial (*social capital*). Partisipasi masyarakat dalam proses menuju desa mandiri,

berarti mengubah paradigma pembangunan desa yang selama ini memposisikan masyarakat selaku objek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut. Partisipasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terhadap tujuan yang hendak dicapai, sehingga memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan. Dalam tataran lebih jauh, partisipasi merupakan langkah awal guna mengubah budaya yang selama ini menjadi bagian dari akar persoalan ketertinggalan desa. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung merupakan refleksi tingkat kepercayaan dalam masyarakat. Karena tingkat kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong proses kemajuan sebuah bangsa. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah akan mengalami kelambanan dalam mencapai tingkat kemajuan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

- 2) Kepemimpinan dan inovasi perangkat desa yakni Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat didalamnya. Kepemimpinan yang efektif akan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara maksimal, tidak hanya dalam tatanan kepatuhan, namun lebih dari itu menimbulkan kesadaran warga terhadap proses menuju desa mandiri. Disamping itu, tentunya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Inovasi diperlukan guna menciptakan program maupun

mengembangkan program yang telah terlaksana. Mengingat belum semua masyarakat desa menciptakan inovasi, dibutuhkan perangkat desa sebagai pemicu sekaligus motor inovasi tersebut. Tidak kalah penting peran perangkat desa sebagai mediator dalam mencari sumber-sumber pendanaan pengembangan desa mandiri. Wadah seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa hingga tingkat kabupaten, menjadi wadah yang efektif bagi upaya mensukseskan program pengembangan desa mandiri, jika berhasil dikawal oleh perangkat desa hingga terlaksana. Sebab, bagaimana pun pendanaan merupakan unsur penting yang salah satunya bisa didapatkan dari APBD.

- 3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelembagaan pendukung sesuai dengan dimensi kemandirian yang hendak dicapai, seperti koperasi, kelompok tani, lumbung desa, forum kesehatan, kader sehat desa, dan kelompok sadar wisata. Dalam konteks desa mandiri ekonomi, misalnya koperasi mampu berperan sebagai penyedia modal, penyedia sarana dan prasarana pendukung usaha warga. (Abdulrahman, 2008).

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, upaya dalam mewujudkan desa mandiri dapat dijalankan ataupun dilaksanakan dengan beberapa komponen dalam indeks desa membangun yaitu: Ketahanan Sosial yaitu kemampuan untuk membuat kehidupan yang nyaman dan aman bagi kehidupan sosial masyarakat. Adapun ketahanan sosial tersebut dapat dengan memaksimalkan seperti pelayanan Kesehatan yang terdiri dari waktu

tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit; tersedia tenaga kesehatan seperti bidan, dokter dan tenaga kesehatan lain; tingkat aktivitas posyandu; serta jaminan kesehatan seperti tingkat kepesertaan BPJS. Kemudian Akses Pendidikan yang terdiri dari akses ke pendidikan SD/MI kurang dari 3 kilometer, akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer, akses ke SMA/SMK kurang dari 6 kilometer, akses ke pengetahuan seperti taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. Modal Sosial yang terdiri dari memiliki kebiasaan bergotong royong di desa, keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga, terdapat kegiatan kelompok olahraga, memiliki toleransi yang baik antar warga, serta partisipasi masyarakat mengadakan siskamling untuk rasa aman penduduk. Lembaga Kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa yang terdiri dari karang taruna, tim penggerak PKK, RT/RW, Posyandu, LPM, dan sebagainya. Partisipasi masyarakat yaitu dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes; memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan dengan ikut dalam pengawasan melaksanakan pembangunan desa, mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut. Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari keragaman produksi masyarakat desa; kemudian menyediakan pusat pelayanan perdagangan seperti pasar rakyat; menyediakan lembaga ekonomi seperti BUMDes dari desa serta koperasi; kualitas jalan desa seperti jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Ketahanan Ekologi yang terdiri dari memperbaiki kualitas lingkungan jika ada pencemaran air, tanah,

sungai yang terkena limbah; potensi rawan bencana alam seperti banjir.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini ditunjukkan agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S. (2018) bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian dan mengkaji tentang menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan peran modal sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Endah bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa mandiri melalui BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

keberadaan BUMDes yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat akan memberikan nilai positif bagi pendapatan asli desa dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengelolaan BUMDes yang dijalankan dengan baik didasari kerjasama dan kebersamaan membuktikan bahwa desa mampu mandiri tanpa menunggu bantuan yang datang dari pusat. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dulu membahas tentang BUMDes secara umum sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang strategi pengembangan BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono dan Darwanto bertujuan untuk mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan mengkaji tentang kendala dalam pengelolaan BUMDes. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Sidik bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mewujudkan desa mandiri melalui BUMDes di Desa

Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan tujuan yang sama yaitu mewujudkan desa mandiri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mario Wowor, Frans Singkoh dan Welly Woworundeng bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kemanga Kecamatan Tompaso. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kemanga memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUMDes desa Kemanga ada 3 jenis usaha yakni peternakan babi, gas lpg dan distributor gula pasir. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini tujuannya yaitu terhadap Pendapatan Asli Desa sedangkan

dalam penelitian yang sekarang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nursetiawan bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa mandiri yang dilakukan oleh BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yaitu: (1) potensi ekonomi, (2) potensi sosial, dan (3) potensi sumber daya manusia (SDM). Dimana ketiga hal tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi yang diimplementasikan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nugrahaningsih, Faikhatun, dan Winarna bertujuan untuk mengetahui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dana desa dilakukan dengan pembentukan BUMDes yang memiliki lima unit usaha, yaitu kolam keceh, bumi perkemahan, sarana air bersih, bank sampah, dan pertanian terpadu. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian terdahulu membahas tentang optimalisasi dana desa sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Anwar, Muhammad Irwansyah Hasibuan dan Edwin Agung Wibowo bertujuan untuk mengetahui dan

menganalisis dampak sosial dan dampak ekonomi keberadaan BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keberadaan BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan dampak yang positif terhadap perubahan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, 2) Dampak sosial akibat dari keberadaan BUMDes mengakibatkan suatu kondisi sosial yang lebih baik di masyarakat desa, hal itu terlihat dengan terselesaikannya permasalahan masyarakat yang timbul akibat dari kesenjangan pembangunan, terjalin komunikasi yang baik antara sesama warga dan juga perangkat pemerintahan desa yang hal itu tidak hanya mengenai permasalahan perekonomian desa tetapi sudah berkembang kepada hal lain seperti keamanan, 3) Dampak ekonomi yang dirasakan dari kehadiran BUMDes terhadap masyarakat belum berjalan maksimal, hal itu bisa dilihat dari kondisi penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dihasilkan desa masih relatif kecil, penyerapan tenaga kerja kecil sehingga belum maksimal mengurangi angka pengangguran dan keberadaan BUMDes belum mampu secara maksimal dalam menambah pendapatan kepada masyarakat desa. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya fokus penelitiannya. Penelitian yang dulu hanya membahas tentang dampak sedangkan pada penelitian ini membahas tentang strategi, dampak, kendala dan juga solusi.

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

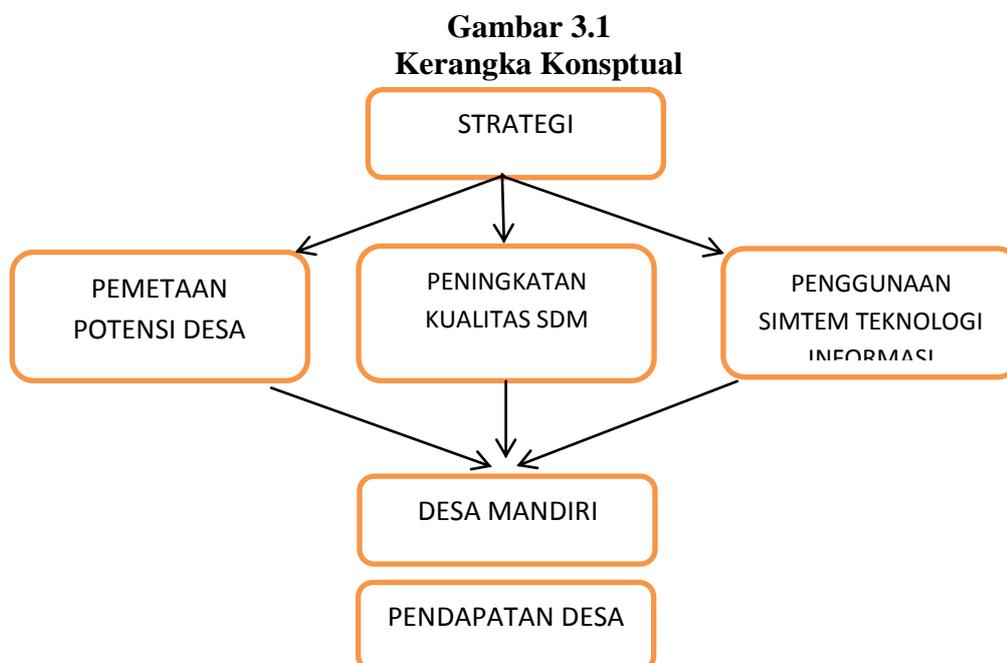
#### **3.1 Kerangka Konseptual**

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian desa dalam konteks otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga social, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa memiliki arti yang strategis. Dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengembangkan suatu strategi yang dikemas dalam Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan demi terwujudnya daerah yang mandiri. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan desa mandiri sebagai manifestasi UU No. 6/2014 tentang Desa, yaitu pertama, melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. Kedua, menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam

aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa. Ketiga, membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis teknologi.

Apabila dilihat dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskriptifkan terkait elemen sosial tertentu yang meliputi individu, masyarakat, kelompok dan lembaga. Penelitian deskriptif mempunyai 4 tipe penelitian yaitu penelitian studi kasus, survey, penelitian kausal, dan penelitian korelasional. Selain itu, penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian studi kasus (case research), yaitu penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada suatu keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai sumber data.



Sumber: Data primer diolah, 2020

### **3.2 Strategi Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri**

- a. pertama, melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. Kabupaten tana toraja merupakan kabupaten yang memiliki banyak potensi wisata, diantaranya ada wisata gunung, gua, air terjun dan lain sebagainya. Diantara banyak wisata yang disuguhkan, wisata adat yang jumlahnya paling, ada juga wisata alam seperti patung yang ada di buntu burake, dan masih banyak lainnya. Dengan demikian, tidak dipungkiri bahwa kabupaten tana toraja termasuk ke dalam kabupaten wisata.
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah desa untuk mewujudkan desa mandiri. Langkah-langkah Pemerintah Desa yang ada di tana toraja antara lain; pemberian pelatihan kelompok tani, nelayan, Pokdarwis serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), peningkatan kapasitas pengalaman agama serta pelatihan kelompok adat dan budaya
- c. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa. Pemerintah Desa yang ada di Tana Toraja dalam menjalankan pemerintahan telah menggunakan sistem teknologi informasi berbasis internet. Segala macam administrasi desa, kependudukan, keuangan dan pelayanan masyarakat menggunakan sistem komputerisasi.